

BAB I

PENDAHULUAN

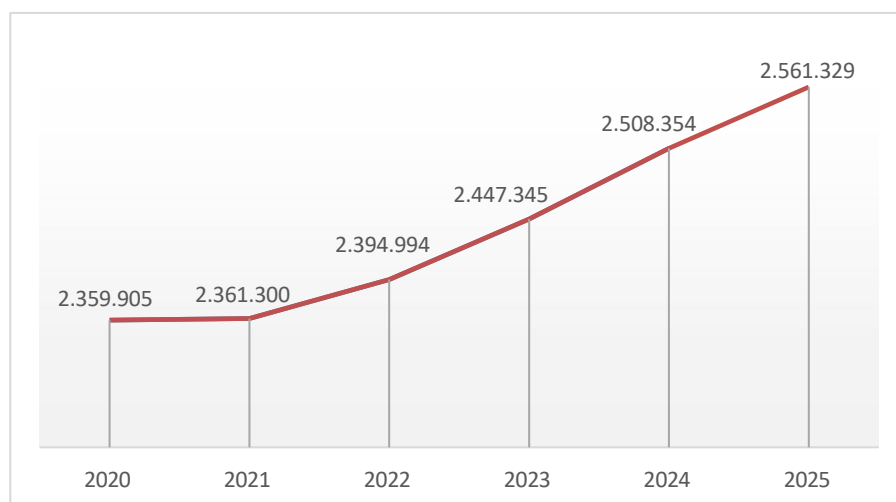
1.1 Latar Belakang

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi daerah karena mencerminkan kemampuan perekonomian dalam menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Namun, Provinsi Aceh masih menghadapi berbagai permasalahan ketenagakerjaan meskipun investasi dan tingkat pendidikan terus mengalami perkembangan.

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi permasalahan ketenagakerjaan, meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Akan tetapi, Provinsi Aceh masih menjadi Provinsi termiskin yang ada di Pulau Sumatera. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi yang dimiliki belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi Aceh. Berdasarkan hasil (Sakernas) Agustus 2023, struktur ketenagakerjaan Aceh masih didominasi oleh sektor informal sebesar 63,91 persen, sedangkan formal 36,09 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja masih bekerja pada sektor dengan produktivitas dan tingkat pendapatan yang relatif rendah.

Tingkat pendidikan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja. Di Provinsi Aceh, rata-rata lama sekolah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, kualitas pendidikan di Aceh masih perlu ditingkatkan karena sebagian tenaga kerja masih memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah dan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja

formal yang memadai. Selain pendidikan, peningkatan investasi melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Akan tetapi, investasi yang masuk belum tentu mampu menyerap tenaga kerja secara optimal apabila lebih terkonsentrasi pada sektor padat modal dan tidak didukung oleh kualitas tenaga kerja yang memadai. Berikut data penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh tahun 2020 – 2025:



Gambar 1. 1 Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh Tahun 2020 – 2025 (Jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh pada tahun 2020 – 2025 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang dimana pada tahun 2020 sebesar 2.359,905 jiwa dan pada tahun 2025 mencapai 2.561,329 jiwa. Menurut Badan Pusat Statistik (2025), penyerapan tenaga kerja di Aceh terdapat kenaikan pada setiap tahunnya, karena banyak tenaga kerja yang terserap pada peningkatan aktivitas sektor tertentu seperti sektor pertanian, perdagangan dan dinamika pasar kerja lokal yang berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja baru.

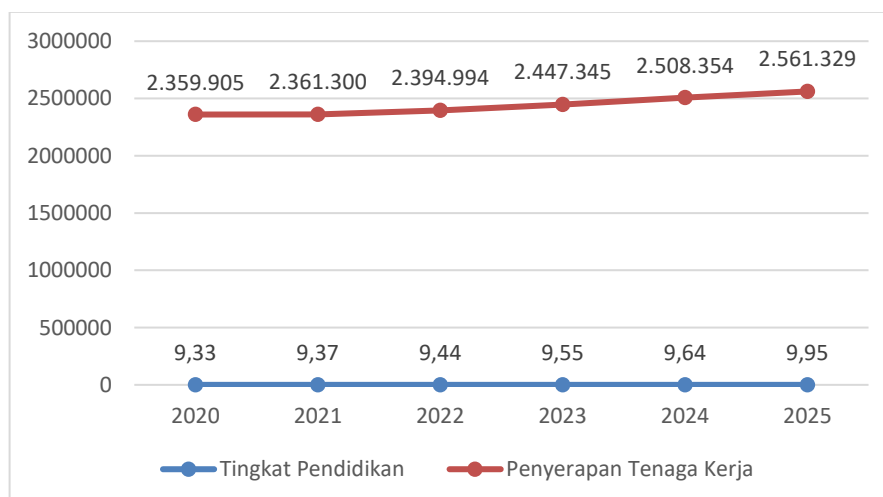
Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan cukup berperan dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemampuan individu agar dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar kerja yang terus berubah. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya menunjukkan kualitas tenaga kerja yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi serta peluang kerja yang lebih luas (Safuridar et., al 2026).

Tingkat pendidikan dapat diukur menggunakan berbagai indikator, seperti Angka Melek Huruf (AMH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Partisipasi Sekolah (APS), maupun Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Namun, penelitian ini menggunakan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) karena indikator tersebut menggambarkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah berhasil ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Dengan demikian, RLS tidak hanya mencerminkan akses terhadap pendidikan, tetapi juga tingkat pendidikan yang benar-benar telah diselesaikan oleh penduduk sehingga lebih representatif dalam menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang telah memasuki usia kerja. Oleh karena itu, RLS dinilai lebih relevan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Meskipun demikian, kondisi pendidikan di Provinsi Aceh masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan kategori tingkat pendidikan yang diukur menggunakan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), pendidikan dapat dikelompokkan menjadi kategori rendah (kurang dari 8 tahun), sedang (8–12 tahun), dan tinggi (lebih dari 12 tahun). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), RLS Provinsi Aceh pada tahun 2024 mencapai 9,64 tahun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Aceh masih berada pada

kategori sedang, yang berarti rata-rata penduduk hanya mampu menempuh pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dan belum mencapai target wajib belajar 12 tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia di Aceh masih perlu ditingkatkan guna mendukung peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja. Rendahnya capaian pendidikan ini berpotensi mengurangi daya saing tenaga kerja Aceh dalam memasuki pasar kerja yang semakin membutuhkan tenaga kerja terampil dan berpendidikan.

Penyerapan tenaga kerja memiliki keterkaitan yang erat dengan investasi. Secara teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dikemukakan oleh Solow dalam Dykas et al, (2024), ketika investasi meningkat maka stok modal dalam perekonomian juga akan bertambah. Peningkatan modal seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan infrastruktur akan mendorong peningkatan produksi, perusahaan membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk mengoperasikan modal baru tersebut. Berikut data tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh tahun 2020 – 2025:



Gambar 1. 2 Tingkat Pendidikan dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh Tahun 2020 – 2025 (Tahun dan Jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2026

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Aceh tahun 2020 – 2025, tingkat pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah di Provinsi Aceh menunjukkan tren meningkat selama tahun 2020–2025. Nilai RLS meningkat dari 9,33 tahun pada tahun 2020 menjadi 9,95 tahun pada tahun 2025 atau bertambah sekitar 0,62 tahun (sekitar tujuh bulan) dalam kurun waktu lima tahun. Meskipun mengalami peningkatan, kenaikan tersebut masih relatif terbatas sehingga belum menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan kategori RLS, capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Provinsi Aceh masih berada pada kategori sedang (8–12 tahun). Kondisi ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Aceh belum menyelesaikan pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi, sehingga kualitas sumber daya manusia masih perlu terus ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Keterkaitan antara pendidikan dan penyerapan tenaga kerja yaitu pendidikan yang lebih tinggi umumnya membuat tenaga kerja memiliki

kemampuan, keterampilan, dan daya saing yang lebih baik dalam memasuki pasar kerja. Selain itu, dunia usaha cenderung membutuhkan tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks. Dalam hasil penelitian Safuridar et al., (2026), pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Aceh. Dalam hasil penelitian Azizy (2026), tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan di Indonesia.

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di negara – negara berkembang karena berperan sebagai sumber pembiayaan yang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan beberapa negara berkembang seperti Korea Selatan, Taiwan dan Tiongkok menunjukkan bahwa pengelolaan investasi yang optimal mampu mempercepat transformasi ekonomi menuju negara maju atau negara industri baru.

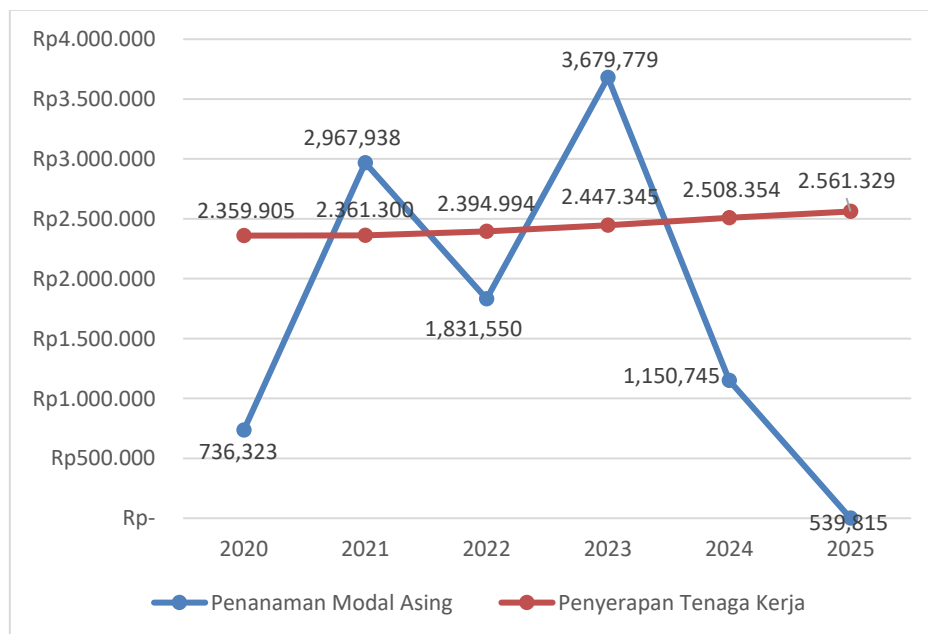
Pertumbuhan ekonomi sendiri menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, pemerintah menghadapi keterbatasan dalam penyediaan modal. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan melalui peningkatan kegiatan investasi melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun dari luar negeri melalui Penanaman Modal Asing (PMA) (Ismawati, 2020).

Menurut UU No 1 Tahun 1967 dan UU No 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan sesuai dengan ketentuan, undang undang ini mengacu pada investasi yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Dalam hal ini, pemilik modal secara langsung menanggung resiko

yang terkait dengan investasi tersebut. PMA dapat meningkatkan investasi dalam sektor infrastruktur, fasilitas produksi, dan teknologi.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh (2024), menyatakan bahwa minimnya dukungan infrastruktur, perizinan yang lambat serta praktek korupsi jadi tantangan bagi pemerintah Aceh untuk menggerakkan perekonomian daerah. Dengan mengandalkan sektor migas dan belanja pemerintah, kondisi perekonomian Aceh sangat rentan dan rawan terhadap berbagai gejolak fluktuasi harga dunia, termasuk resesi yang bisa saja terjadi.

Selain beberapa kendala yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) (2024), ada juga beberapa kendala lain yang dikeluhkan oleh para investor, baik dari dalam negeri maupun asing adalah kurangnya kepastian hukum bagi para investor sehingga ini dapat mengurangi minat investasi di Aceh. Maka dari itu Kepala DPMPTSP menyatakan bahwa mereka terus berupaya menghadirkan banyak kegiatan investasi dalam berbagai sektor unggulan di Aceh, salah satunya memberikan kemudahan berusaha dan perizinan pada setiap investor yang akan menanamkan modalnya di Aceh. Berikut data Penanaman Modal Asing dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh tahun 2020 – 2025:



Gambar 1. 3 Penanaman Modal Asing dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh Tahun 2020 – 2025 (Juta Rupiah dan Jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2026

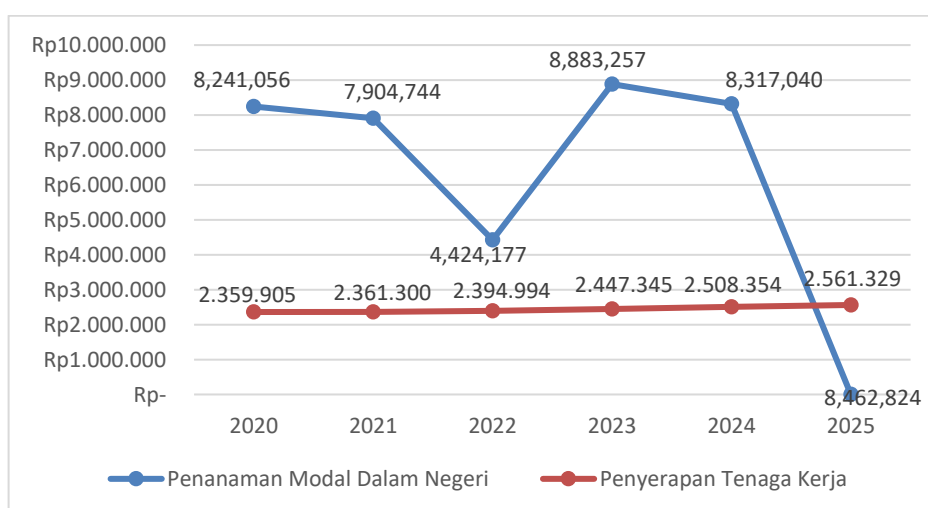
Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Aceh tahun 2020 – 2025 dalam pergerakan yang fluktuasi. Dimulai dari tahun 2020 realisasi PMA sebesar 736.323 juta rupiah, dan ditahun 2021 PMA mengalami peningkatan menjadi sebesar 2.967.938 Juta rupiah karena investor asing memiliki ketertarikan terhadap proyek – proyek investasi yang ada di Aceh. Tahun 2022 PMA mengalami penurunan menjadi sebesar 1.831.550 juta rupiah. Menurut Bank Indonesia (2022), penurunan ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang masih berada dalam masa pemulihan pasca pandemi Covid-19 sehingga investor cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan investasi. Menurut Bank Indonesia (2023), peningkatan PMA sebesar 3.679.779 juta rupiah pada tahun 2023 didukung oleh membaiknya aktivitas ekonomi setelah pencabutan pembatasan Covid-19 serta meningkatnya mobilitas dan aktivitas konsumsi masyarakat. Penurunan PMA pada tahun 2024 sebesar

1.150.745 juta rupiah dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi serta sikap wait and see investor menjelang transisi pemerintahan dan kondisi ekonomi global (Bisnis.com, 2024). Tahun 2025 PMA mengalami penurunan menjadi sebesar 539.815 juta rupiah, penurunan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah serta belum optimalnya perkembangan investasi di Aceh sehingga minat investor asing untuk menanamkan modal relatif lebih rendah (Bank Indonesia, 2025). Dalam hasil penelitian Rachman (2022), Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hasil penelitian Astuti (2023), Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat.

Selain Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan memanfaatkan sumber modal yang berasal dari dalam negeri. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa modal dalam negeri merupakan modal yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, baik secara perorangan maupun melalui badan usaha (Fadhillah et al, 2023). Pentingnya tercipta lapangan pekerjaan dari proyek investasi juga menjadi tolak ukur keberhasilan realisasi investasi serta dampak yang diberikan bagi kehidupan sosial masyarakat provinsi Aceh. Investasi memiliki dampak positif bagi pembangunan infrastruktur daerah, ketika banyak investasi masuk maka akan munculnya bisnis baru atau usaha baru dari berbagai sektor akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Menurut berita Antara News (2025), PMDN dengan kontribusi terbesar dari

sektor industri makanan sebesar 5,88%, transportasi sebesar 5,9% dan pertanian sebesar 16% yang tersebar diberbagai kabupaten/kota di Aceh. Meskipun PMDN ini berpotensi menciptakan lapangan kerja, bukti empiris menunjukkan bahwa kontribusi PMDN terhadap penyerapan tenaga kerja belum optimal di Aceh. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas sumber daya manusia, proses perizinan serta keterbatasan peluang kerja di sektor-sektor prioritas, sehingga meskipun investasi domestik memberikan modal bagi sektor usaha, secara langsung dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja masih terbatas dan perlu dukungan kebijakan yang lebih kuat. Berikut data Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh tahun 2020 – 2025:



Gambar 1. 4 Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh Tahun 2020 – 2025 (Juta Rupiah dan Jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Investasi dan Hiliarisasi/BKPM, 2026

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Aceh tahun 2020 – 2025 dalam pergerakan yang fluktuasi. Dimulai dari tahun 2020 realisasi sebesar 8.241.056 juta rupiah. Tahun 2021 dan 2022 PMDN mengalami penurunan menjadi

sebesar 7.904.744 Juta rupiah dan 4.424.177 juta rupiah, penurunan tersebut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang masih terdampak pandemi Covid-19 sehingga menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan mempengaruhi aktivitas investasi di berbagai daerah (Bank Indonesia, 2022). Pada tahun 2023 PMDN mengalami peningkatan menjadi sebesar 8.883.257 juta rupiah, peningkatan tersebut didukung oleh upaya pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi serta meningkatnya aktivitas investasi setelah kondisi ekonomi mulai stabil pasca pandemi Covid-19 (Badan Pusat Statistik Aceh, 2023). Tahun 2024 PMDN kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 8.317.040 juta rupiah, penurunan ini dipengaruhi oleh perlambatan realisasi investasi dan sikap wait and see investor terhadap kondisi ekonomi dan transisi pemerintahan (Kementerian Investasi/BKPM, 2024). Tahun 2025 PMDN mengalami penurunan menjadi sebesar 8.462.824 juta rupiah, penurunan tersebut diduga dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah dan menurunnya aktivitas investasi di Aceh (Bank Indonesia, 2025). Meskipun realisasi PMDN mengalami peningkatan pada beberapa tahun, peningkatan tersebut belum mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya investasi domestik belum tentu diikuti oleh penciptaan lapangan kerja baru. Hal tersebut diduga karena investasi lebih banyak dialokasikan pada sektor-sektor yang padat modal, modernisasi peralatan produksi, atau pengembangan usaha yang tidak membutuhkan tambahan tenaga kerja dalam jumlah besar. Dalam hasil penelitian Gaol (2023), penanaman modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral di Provinsi Sumatera Utara. Dalam hasil penelitian Putri (2024), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh

negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan sumber-sumber peneliti terdahulu yang telah dikutip dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan banyak berfokus pada pertumbuhan ekonomi, upah minimum, maupun pengeluaran pemerintah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Priskania (2023), yang menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, upah minimum, tingkat pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Namun penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji peran investasi, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, yang merupakan faktor utama dalam penciptaan lapangan pekerjaan melalui ekspansi sektor riil.

Selain itu, penelitian sebelumnya dilakukan di Jawa Timur yang memiliki struktur ekonomi yang berbeda dengan Provinsi Aceh. Perbedaan ini membuka ruang analisis baru terkait bagaimana tingkat pendidikan, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dalam konteks daerah yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “ **Pengaruh Tingkat Pendidikan, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh** ”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penjelasan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Aceh?
2. Bagaimana pengaruh penanaman modal asing terhadap penyerapan tenaga

kerja di Aceh?

3. Bagaimana pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap penyerapan tenaga kerja di Aceh?
4. Bagaimana variabel tingkat pendidikan, pma dan pmdn secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa hal yang disebutkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Aceh.
2. Mengetahui pengaruh penanaman modal asing terhadap penyerapan tenaga kerja di Aceh.
3. Mengetahui pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap penyerapan tenaga kerja di Aceh.
4. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pma dan pmdn secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja di Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penjelasan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh Tingkat Pendidikan, PMA dan PMDN terhadap penyerapan tenaga kerja di Aceh.

2. Memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur ekonomi dan ketenagakerjaan, tentang variabel-variabel yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.
3. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas hubungan variabel ekonomi dan pasar tenaga kerja di tingkat daerah maupun nasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penjelasan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Memberikan masukan dan gambaran bagi pemerintah Aceh dalam merancang kebijakan yang efektif untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
2. Menjadi acuan bagi pengambilan kebijakan dalam menyusun strategi pengembangan ekonomi daerah yang berorientasi pada penciptaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kondisi ekonomi.
3. Memberikan informasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang dampak kebijakan Investasi maupun tingkat pendidikan terhadap kesempatan kerja di Aceh, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien.